



## **RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2025**



### **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKAYANG**

Jalan Trans Guna Baru Rangkang, Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang  
BENGKAYANG 79212

***DPMPTSP@GMAIL.COM***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang penetapannya tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.

Kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang pada awalnya berbentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkayang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, namun pada pelaksanaannya ternyata kurang efektif dan tidak efisien dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga ditingkatkan status kelembagaannya menjadi Dinas.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka diperlukan Rencana Kerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Renja merupakan langkah awal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Tahun 2025, dan sebagai acuan dalam pelaksanaan program ditahun tersebut. Rencana Kerja sangat penting bagi upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah di tetapkan karena hal yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) pada dasarnya adalah indicator sasaran (Outcome) dan pada setiap kegiatan akan mendukung pencapaian sasaran atau indicator hasil sesuai dengan sasaran yang diinginkan.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2025, dibuat dan disusun sebagai pedoman kerja yang lebih terukur, terfokus, transparan dan akuntabel dalam penerapannya di Tahun 2025, semoga bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, terima kasih.

Bengkayang, 3 Juni 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BENGKAYANG



**PAULUS, SH., M.Kn**

Pembina Tk.I

NIP. 19740718 200212 1 004

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi .....	2
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>3</b>
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2023.....</b>	<b>9</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	20
<b>BAB III : TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN PD .....</b>	<b>26</b>
3.1. Tujuan dan sasaran .....	27
3.2. Program dan Kegiatan .....	29
<b>BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD.....</b>	<b>32</b>
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
4.1. Catatan Penting .....	33
4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan .....	33
4.3. Rencana Tindak Lanjut .....	34
<b>LAMPIRAN I .....</b>	

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki rencana kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS).

Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Bengkayang tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan rancangan renja PD.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang sebagai Perangkat Daerah (PD) pada tahun 2025 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025. Renja PD merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah (PD) yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh PD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kabupaten Bengkayang tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Bengkayang tahun 2025 yang telah ditetapkan prioritas pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pelayanan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di Daerah.

## 1.2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran negara RI nomor 4421);
- g. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- h. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- i. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- j. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
- k. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas system keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 20198 (Covid-19) dan/atau stabilitas system keuangan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- l. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
- n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- o. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2008 tentang pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- r. Peraturan Kepala BKPM Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- s. Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan di Bidang Penanaman Modal;

- t. Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 509);
- u. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik;
- v. Keputusan Menteri Pemberdayaan dan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/2003, tanggal 10 Juli 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- w. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/1191/V/BANGDA tentang Penyempurnaan Panduan Nasional Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- y. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang
- z. Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Kabupaten Bengkayang ( Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 45); dan
- aa. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Bengkayang tahun 2021-2026.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang ini adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program – program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan harapan dapat mencapai Visi Misi Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang adalah :

1. Mendiskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang;
2. Mengupayakan program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Mengemukakan latar belakang penyusunan Rencana Kerja PD, Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja PD, pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD, Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja PD.

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD TAHUN LALU**

Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

#### **BAB III TUJUAN,SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

#### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat kumpulan kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam organisasi. Program diarahkan untuk mencapai Visi dan Misi Organisasi secara terukur, sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan strategisnya. Maka langkah operasionalnya harus dinaungkan ke dalam program dan kegiatan indikatif dalam kurun waktu satu tahun.

## **BAB V PENUTUP**

Memuat uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya, seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**  
**PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023**

Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Bengkayang adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Bengkayang. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Kinerja merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) DPMPTSP Kabupaten Bengkayang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Bengkayang selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

**Evaluasi Program Tahun 2023**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, anggaran belanja DPMPTSP Kabupaten Bengkayang setelah perubahan Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp.

4.599.870.751. Keseluruhan anggaran tersebut terbagi dalam Belanja Operasi dan Belanja Modal dan realisasi sebagaimana tabel berikut :


**ANGGARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN BENGKAYANG  
TAHUN ANGGARAN 2023**

	<b><i>BELANJA</i></b>	<b><i>Rp. 4.599.870.751</i></b>
<b><i>A</i></b>	<b><i>BELANJA OPERASIONAL</i></b>	<b><i>RP. 4.465.023.751</i></b>
	<i>Belanja pegawai</i>	<i>RP. 2.682.581.999</i>
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>RP. 1.782.441.752</i>
<b><i>B</i></b>	<b><i>BELANJA MODAL</i></b>	<b><i>RP. 134.847.000</i></b>
	<i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</i>	<i>RP. 74.847.000</i>
	<i>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</i>	<i>Rp. 60.000.00</i>
	<b><i>JUMLAH</i></b>	<b><i>RP. 4.599.870.751</i></b>
	<b><i>Surplus/(Defisit)</i></b>	<b><i>(Rp3.743.870.751)</i></b>

Anggaran Tahun 2023 DPMPSTP Kabupaten Bengkayang Belanja Operasi dan Belanja Modal sebesar Rp. 4.599.870.751,- dengan 6 program dan 12 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp.4.181.578.744,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 90.91%.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Realisasi Anggaran  
Tahun Anggaran 2023

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG</b> <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b> LAPORAN REALISASI ANGGARAN, PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023				
URUSAN PEMERINTAH		: 2.18 PENANAMAN MODAL		
UNIT ORGANISASI		: 2-18.0-00.0-00.01.001 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
SUB UNIT ORGANISASI		: 2-18.0-00.0-00.01.001.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	856.000.000,00	22.703.000,00	2,65
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	856.000.000,00	22.703.000,00	2,65
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	856.000.000,00	22.703.000,00	2,65
00.0.00.00.4.1.02.03	Retribusi Perlinan Tertentu	856.000.000,00	22.703.000,00	2,65
00.0.00.00.4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	856.000.000,00	22.703.000,00	2,65
00.0.00.00.4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	856.000.000,00	22.703.000,00	2,65
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	4.599.870.751,00	4.181.578.744,00	90,91
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.788.514.551,00	3.544.557.809,00	93,56
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.820.500,00	22.020.700,00	59,8
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.387.000,00	12.073.700,00	69,44
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	17.387.000,00	12.073.700,00	69,44
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.387.000,00	12.073.700,00	69,44
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	2.363.500,00	0	0
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.363.500,00	0	0
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.363.500,00	0	0
01.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.387.500,00	2.302.500,00	96,44
01.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.387.500,00	2.302.500,00	96,44
01.2.01.01.5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	2.387.500,00	2.302.500,00	96,44
01.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	12.636.000,00	9.771.200,00	77,33
01.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.636.000,00	9.771.200,00	77,33
01.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.636.000,00	9.771.200,00	77,33
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	4.421.000,00	4.101.500,00	92,77
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	4.421.000,00	4.101.500,00	92,77
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.421.000,00	4.101.500,00	92,77
01.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	2.673.500,00	2.384.000,00	89,17
01.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.673.500,00	2.384.000,00	89,17
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	773.500,00	544.000,00	70,33
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.900.000,00	1.840.000,00	96,84
01.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.747.500,00	1.717.500,00	98,28
01.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.747.500,00	1.717.500,00	98,28
01.2.01.02.5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1.747.500,00	1.717.500,00	98,28
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.749.500,00	0	0
01.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.749.500,00	0	0
01.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.749.500,00	0	0
01.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	2.000,00	0	0
01.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000,00	0	0
01.2.01.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.000,00	0	0
01.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.747.500,00	0	0
01.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.747.500,00	0	0
01.2.01.03.5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1.747.500,00	0	0
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.421.000,00	1.717.500,00	38,85
01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	4.421.000,00	1.717.500,00	38,85
01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.421.000,00	1.717.500,00	38,85
01.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	2.673.500,00	0	0
01.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.673.500,00	0	0

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025  
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang

01.2.01.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	773.500,00	0	0
01.2.01.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.900.000,00	0	0
01.2.01.04.5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>	<b>1.747.500,00</b>	<b>1.717.500,00</b>	<b>98,28</b>
01.2.01.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.747.500,00	1.717.500,00	98,28
01.2.01.04.5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1.747.500,00	1.717.500,00	98,28
01.2.01.05	<b>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD</b>	<b>4.421.000,00</b>	<b>2.064.000,00</b>	<b>46,69</b>
01.2.01.05.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>4.421.000,00</b>	<b>2.064.000,00</b>	<b>46,69</b>
01.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.421.000,00	2.064.000,00	46,69
01.2.01.05.5.1.02.01	Belanja Barang	2.673.500,00	2.064.000,00	77,2
01.2.01.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.673.500,00	2.064.000,00	77,2
01.2.01.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	773.500,00	224.000,00	28,96
01.2.01.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.900.000,00	1.840.000,00	96,84
01.2.01.05.5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>	<b>1.747.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.2.01.05.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.747.500,00	0	0
01.2.01.05.5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1.747.500,00	0	0
01.2.01.06	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	<b>4.421.000,00</b>	<b>2.064.000,00</b>	<b>46,69</b>
01.2.01.06.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>4.421.000,00</b>	<b>2.064.000,00</b>	<b>46,69</b>
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.421.000,00	2.064.000,00	46,69
01.2.01.06.5.1.02.01	Belanja Barang	2.673.500,00	2.064.000,00	77,2
01.2.01.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.673.500,00	2.064.000,00	77,2
01.2.01.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	773.500,00	224.000,00	28,96
01.2.01.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.900.000,00	1.840.000,00	96,84
01.2.01.06.5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>	<b>1.747.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.2.01.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.747.500,00	0	0
01.2.01.06.5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1.747.500,00	0	0
01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.829.077.031,00</b>	<b>2.778.396.092,00</b>	<b>98,2</b>
01.2.02.01	<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>2.532.941.999,00</b>	<b>2.510.680.132,00</b>	<b>99,12</b>
01.2.02.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.532.941.999,00</b>	<b>2.510.680.132,00</b>	<b>99,12</b>
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.532.941.999,00	2.510.680.132,00	99,12
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.645.712.185,00	1.644.280.236,00	99,91
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.174.984.920,00	1.173.608.520,00	99,88
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.174.984.920,00	1.173.608.520,00	99,88
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	106.771.386,00	106.771.386,00	100
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	106.771.386,00	106.771.386,00	100
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	155.190.000,00	155.190.000,00	100
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	155.190.000,00	155.190.000,00	100
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	27.090.000,00	27.090.000,00	100
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	27.090.000,00	27.090.000,00	100
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	69.885.300,00	69.885.300,00	100
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	69.885.300,00	69.885.300,00	100
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.237.360,00	4.197.360,00	99,06
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.237.360,00	4.197.360,00	99,06
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	18.537,00	14.300,00	77,14
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	18.537,00	14.300,00	77,14
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	97.873.798,00	97.873.798,00	100
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	97.873.798,00	97.873.798,00	100
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.419.685,00	2.412.377,00	99,7
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.419.685,00	2.412.377,00	99,7
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	7.241.199,00	7.237.195,00	99,94
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.241.199,00	7.237.195,00	99,94
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	887.229.714,00	866.399.896,00	97,65
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	865.479.078,00	844.649.260,00	97,59
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	865.479.078,00	844.649.260,00	97,59
01.2.02.01.5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	21.750.636,00	21.750.636,00	100
01.2.02.01.5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	21.750.636,00	21.750.636,00	100
01.2.02.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	100	0	0

01.2.02.01.5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	100	0	0
01.2.02.01.5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	100	0	0
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	261.448.032,00	246.180.360,00	94,16
01.2.02.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	261.448.032,00	246.180.360,00	94,16
01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	261.448.032,00	246.180.360,00	94,16
01.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	261.448.032,00	246.180.360,00	94,16
01.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	235.200.000,00	231.600.000,00	98,47
01.2.02.02.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	117.600.000,00	115.200.000,00	97,96
01.2.02.02.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	49.200.000,00	49.200.000,00	100
01.2.02.02.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	68.400.000,00	67.200.000,00	98,25
01.2.02.02.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Auransi	26.248.032,00	14.580.360,00	55,55
01.2.02.02.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	17.379.936,00	13.284.360,00	76,44
01.2.02.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4.434.048,00	576.000,00	12,99
01.2.02.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.434.048,00	720.000,00	16,24
01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.956.000,00	6.853.000,00	86,14
01.2.02.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	7.956.000,00	6.853.000,00	86,14
01.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.956.000,00	6.853.000,00	86,14
01.2.02.04.5.1.02.01	Belanja Barang	4.822.000,00	3.790.000,00	78,6
01.2.02.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.822.000,00	3.790.000,00	78,6
01.2.02.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.972.000,00	1.030.000,00	52,23
01.2.02.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.850.000,00	2.760.000,00	96,84
01.2.02.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.134.000,00	3.063.000,00	97,73
01.2.02.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.134.000,00	3.063.000,00	97,73
01.2.02.04.5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	3.134.000,00	3.063.000,00	97,73
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.670.000,00	7.752.500,00	89,42
01.2.02.05.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	8.670.000,00	7.752.500,00	89,42
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.670.000,00	7.752.500,00	89,42
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	5.250.500,00	4.648.000,00	88,52
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.250.500,00	4.648.000,00	88,52
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.688.000,00	1.198.000,00	70,97
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.562.500,00	3.450.000,00	96,84
01.2.02.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.419.500,00	3.104.500,00	90,79
01.2.02.05.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.419.500,00	3.104.500,00	90,79
01.2.02.05.5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	3.419.500,00	3.104.500,00	90,79
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18.061.000,00	6.930.100,00	38,37
01.2.02.07.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	18.061.000,00	6.930.100,00	38,37
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.061.000,00	6.930.100,00	38,37
01.2.02.07.5.1.02.01	Belanja Barang	1.407.000,00	829.100,00	58,93
01.2.02.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.407.000,00	829.100,00	58,93
01.2.02.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.407.000,00	829.100,00	58,93
01.2.02.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	6.170.000,00	6.101.000,00	98,88
01.2.02.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6.170.000,00	6.101.000,00	98,88
01.2.02.07.5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	6.170.000,00	6.101.000,00	98,88
01.2.02.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	10.484.000,00	0	0
01.2.02.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.484.000,00	0	0
01.2.02.07.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.484.000,00	0	0
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19.894.000,00	1.221.400,00	6,14
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	19.894.000,00	1.221.400,00	6,14
01.2.05.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	19.894.000,00	1.221.400,00	6,14
01.2.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.894.000,00	1.221.400,00	6,14
01.2.05.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	19.894.000,00	1.221.400,00	6,14
01.2.05.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.894.000,00	1.221.400,00	6,14
01.2.05.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.894.000,00	1.221.400,00	6,14
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	298.178.700,00	259.957.786,00	87,18

01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.169.100,00	15.837.800,00	97,95
01.2.06.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	16.169.100,00	15.837.800,00	97,95
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.169.100,00	15.837.800,00	97,95
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	16.169.100,00	15.837.800,00	97,95
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.169.100,00	15.837.800,00	97,95
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	16.169.100,00	15.837.800,00	97,95
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.375.800,00	52.921.900,00	97,33
01.2.06.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	54.375.800,00	52.921.900,00	97,33
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.375.800,00	52.921.900,00	97,33
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	54.375.800,00	52.921.900,00	97,33
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	54.375.800,00	52.921.900,00	97,33
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	54.375.800,00	52.921.900,00	97,33
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.600.000,00	63.414.000,00	96,67
01.2.06.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	65.600.000,00	63.414.000,00	96,67
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.600.000,00	63.414.000,00	96,67
01.2.06.04.5.1.02.01	Belanja Barang	60.000.000,00	57.814.000,00	96,36
01.2.06.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	60.000.000,00	57.814.000,00	96,36
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	53.550.000,00	51.874.000,00	96,87
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.450.000,00	5.940.000,00	92,09
01.2.06.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	5.600.000,00	5.600.000,00	100
01.2.06.04.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.600.000,00	5.600.000,00	100
01.2.06.04.5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	5.600.000,00	5.600.000,00	100
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.002.800,00	47.679.700,00	86,69
01.2.06.05.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	55.002.800,00	47.679.700,00	86,69
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.002.800,00	47.679.700,00	86,69
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	55.002.800,00	47.679.700,00	86,69
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	55.002.800,00	47.679.700,00	86,69
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	52.032.800,00	45.603.700,00	87,64
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.970.000,00	2.076.000,00	69,9
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.500.000,00	7.350.000,00	44,55
01.2.06.06.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	16.500.000,00	7.350.000,00	44,55
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	7.350.000,00	44,55
01.2.06.06.5.1.02.01	Belanja Barang	13.320.000,00	7.350.000,00	55,18
01.2.06.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.320.000,00	7.350.000,00	55,18
01.2.06.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.320.000,00	7.350.000,00	55,18
01.2.06.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.180.000,00	0	0
01.2.06.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.180.000,00	0	0
01.2.06.06.5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.180.000,00	0	0
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.531.000,00	72.754.386,00	80,36
01.2.06.09.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	90.531.000,00	72.754.386,00	80,36
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.531.000,00	72.754.386,00	80,36
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	90.531.000,00	72.754.386,00	80,36
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	90.531.000,00	72.754.386,00	80,36
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	90.531.000,00	72.754.386,00	80,36
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	139.847.000,00	131.400.000,00	93,96
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	139.847.000,00	131.400.000,00	93,96
01.2.07.10.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	5.000.000,00	4.800.000,00	96
01.2.07.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.800.000,00	96
01.2.07.10.5.1.02.01	Belanja Barang	5.000.000,00	4.800.000,00	96
01.2.07.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	4.800.000,00	96
01.2.07.10.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.000.000,00	4.800.000,00	96
01.2.07.10.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	134.847.000,00	126.600.000,00	93,88
01.2.07.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.847.000,00	73.900.000,00	98,73
01.2.07.10.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	74.847.000,00	73.900.000,00	98,73
01.2.07.10.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	74.847.000,00	73.900.000,00	98,73

01.2.07.10.5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	74.847.000,00	73.900.000,00	98,73
01.2.07.10.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.000.000,00	52.700.000,00	87,83
01.2.07.10.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	60.000.000,00	52.700.000,00	87,83
01.2.07.10.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	60.000.000,00	52.700.000,00	87,83
01.2.07.10.5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	60.000.000,00	52.700.000,00	87,83
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	306.307.120,00	222.741.617,00	72,72
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.280.000,00	6.280.000,00	100
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.280.000,00	6.280.000,00	100
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.280.000,00	6.280.000,00	100
01.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	6.280.000,00	6.280.000,00	100
01.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.280.000,00	6.280.000,00	100
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.280.000,00	6.280.000,00	100
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.987.120,00	50.417.617,00	55,41
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	90.987.120,00	50.417.617,00	55,41
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.987.120,00	50.417.617,00	55,41
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	90.987.120,00	50.417.617,00	55,41
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	90.987.120,00	50.417.617,00	55,41
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	8.426.880,00	2.967.200,00	35,21
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	64.560.240,00	34.447.817,00	53,36
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	18.000.000,00	13.002.600,00	72,24
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	209.040.000,00	166.044.000,00	79,43
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	209.040.000,00	166.044.000,00	79,43
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	149.640.000,00	133.044.000,00	88,91
01.2.08.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	149.640.000,00	133.044.000,00	88,91
01.2.08.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	132.120.000,00	121.164.000,00	91,71
01.2.08.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	123.960.000,00	114.636.000,00	92,48
01.2.08.04.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	6.528.000,00	80
01.2.08.04.5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	17.520.000,00	11.880.000,00	67,81
01.2.08.04.5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	17.520.000,00	11.880.000,00	67,81
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.400.000,00	33.000.000,00	55,56
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	59.400.000,00	33.000.000,00	55,56
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	59.400.000,00	33.000.000,00	55,56
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	55.800.000,00	33.000.000,00	59,14
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	3.600.000,00	0	0
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.390.200,00	128.820.214,00	81,3
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.325.000,00	4.436.300,00	83,31
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.325.000,00	4.436.300,00	83,31
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.325.000,00	4.436.300,00	83,31
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	5.325.000,00	4.436.300,00	83,31
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.325.000,00	4.436.300,00	83,31
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	5.325.000,00	4.436.300,00	83,31
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	111.965.200,00	95.073.914,00	84,91
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	111.965.200,00	95.073.914,00	84,91
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.965.200,00	95.073.914,00	84,91
01.2.09.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	111.965.200,00	95.073.914,00	84,91
01.2.09.02.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	111.965.200,00	95.073.914,00	84,91
01.2.09.02.5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	33.500.000,00	33.025.000,00	98,58

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025  
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang

01.2.09.02.5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	78.465.200,00	62.048.914,00	79,08
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.760.000,00	17.080.000,00	96,17
01.2.09.06.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	17.760.000,00	17.080.000,00	96,17
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.760.000,00	17.080.000,00	96,17
01.2.09.06.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	17.760.000,00	17.080.000,00	96,17
01.2.09.06.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.760.000,00	17.080.000,00	96,17
01.2.09.06.5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.600.000,00	8.970.000,00	93,44
01.2.09.06.5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8.160.000,00	8.110.000,00	99,39
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.340.000,00	12.230.000,00	52,4
01.2.09.10.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	23.340.000,00	12.230.000,00	52,4
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.340.000,00	12.230.000,00	52,4
01.2.09.10.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	23.340.000,00	12.230.000,00	52,4
01.2.09.10.5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	23.340.000,00	12.230.000,00	52,4
01.2.09.10.5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	23.340.000,00	12.230.000,00	52,4
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>59.401.000,00</b>	<b>43.911.316,00</b>	<b>73,92</b>
02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	59.401.000,00	43.911.316,00	73,92
02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	27.600.000,00	19.147.732,00	69,38
02.2.02.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	27.600.000,00	19.147.732,00	69,38
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	19.147.732,00	69,38
02.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	2.600.000,00	0	0
02.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.600.000,00	0	0
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.240.000,00	0	0
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	360.000,00	0	0
02.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	19.147.732,00	76,59
02.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.000.000,00	19.147.732,00	76,59
02.2.02.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.000.000,00	19.147.732,00	76,59
02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	31.801.000,00	24.763.584,00	77,87
02.2.02.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	31.801.000,00	24.763.584,00	77,87
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.801.000,00	24.763.584,00	77,87
02.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	2.181.000,00	0	0
02.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.181.000,00	0	0
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	702.000,00	0	0
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.479.000,00	0	0
02.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	29.620.000,00	24.763.584,00	83,6
02.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	29.620.000,00	24.763.584,00	83,6
02.2.02.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29.620.000,00	24.763.584,00	83,6
<b>3</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>67.542.000,00</b>	<b>51.908.834,00</b>	<b>76,85</b>
03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	67.542.000,00	51.908.834,00	76,9
03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	36.422.000,00	30.810.116,00	84,59
03.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	36.422.000,00	30.810.116,00	84,59
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.422.000,00	30.810.116,00	84,59
03.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	1.800.000,00	0	0
03.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.800.000,00	0	0
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000,00	0	0
03.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	13.800.000,00	11.100.000,00	80,43
03.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	13.800.000,00	11.100.000,00	80,43
03.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.800.000,00	11.100.000,00	80,43
03.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	20.822.000,00	19.710.116,00	94,66
03.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.822.000,00	19.710.116,00	94,66

03.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.822.000,00	19.710.116,00	94,66
03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	31.120.000,00	21.098.718,00	67,8
03.2.01.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	31.120.000,00	21.098.718,00	67,8
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.120.000,00	21.098.718,00	67,8
03.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	31.120.000,00	21.098.718,00	67,8
03.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	31.120.000,00	21.098.718,00	67,8
03.2.01.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31.120.000,00	21.098.718,00	67,8
4	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	163.415.200,00	152.624.535,00	93,4
04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Pemanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	163.415.200,00	152.624.535,00	93,4
04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	86.968.000,00	79.569.569,00	91,49
04.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	86.968.000,00	79.569.569,00	91,49
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.968.000,00	79.569.569,00	91,49
04.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	86.968.000,00	79.569.569,00	91,49
04.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	86.968.000,00	79.569.569,00	91,49
04.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	86.968.000,00	79.569.569,00	91,49
04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	9.300.000,00	8.950.000,00	96,24
04.2.01.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	9.300.000,00	8.950.000,00	96,24
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	8.950.000,00	96,24
04.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	9.300.000,00	8.950.000,00	96,24
04.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.300.000,00	8.950.000,00	96,24
04.2.01.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.300.000,00	8.950.000,00	96,24
04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	46.187.200,00	44.995.158,00	97,42
04.2.01.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	46.187.200,00	44.995.158,00	97,42
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.187.200,00	44.995.158,00	97,42
04.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	30.352.200,00	29.683.500,00	97,8
04.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	30.352.200,00	29.683.500,00	97,8
04.2.01.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.102.000,00	1.950.000,00	92,77
04.2.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.205.200,00	6.922.500,00	96,06
04.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.045.000,00	20.811.000,00	98,89
04.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	15.835.000,00	15.311.658,00	96,7
04.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.835.000,00	15.311.658,00	96,7
04.2.01.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.710.000,00	15.311.658,00	97,46
04.2.01.03.5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	125.000,00	0	0
04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	20.960.000,00	19.109.808,00	91,17
04.2.01.04.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	20.960.000,00	19.109.808,00	91,17
04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.960.000,00	19.109.808,00	91,17
04.2.01.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	900.000,00	0	0
04.2.01.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	0	0
04.2.01.04.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	900.000,00	0	0
04.2.01.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	20.060.000,00	19.109.808,00	95,26
04.2.01.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.060.000,00	19.109.808,00	95,26
04.2.01.04.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.060.000,00	19.109.808,00	95,26
5	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	511.300.000,00	380.746.450,00	74,47
05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	511.300.000,00	380.746.450,00	74,5
05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	435.700.000,00	343.796.600,00	78,91
05.2.01.02.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	435.700.000,00	343.796.600,00	78,91

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025  
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang

05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	435.700.000,00	343.796.600,00	78,91
05.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	30.538.000,00	20.472.400,00	67,04
05.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	30.538.000,00	20.472.400,00	67,04
05.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.938.000,00	10.472.400,00	95,74
05.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.600.000,00	10.000.000,00	51,02
05.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	300.950.000,00	278.325.000,00	92,48
05.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	35.700.000,00	30.900.000,00	86,55
05.2.01.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.200.000,00	8.400.000,00	63,64
05.2.01.02.5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	22.500.000,00	22.500.000,00	100
05.2.01.02.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	265.250.000,00	247.425.000,00	93,28
05.2.01.02.5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	265.250.000,00	247.425.000,00	93,28
05.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	104.212.000,00	44.999.200,00	43,18
05.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	104.212.000,00	44.999.200,00	43,18
05.2.01.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	104.212.000,00	44.999.200,00	43,18
05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	75.600.000,00	36.949.850,00	48,88
05.2.01.03.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>75.600.000,00</b>	<b>36.949.850,00</b>	<b>48,88</b>
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.600.000,00	36.949.850,00	48,88
05.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	13.475.000,00	12.459.850,00	92,47
05.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.475.000,00	12.459.850,00	92,47
05.2.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.675.000,00	3.384.850,00	92,1
05.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.800.000,00	9.075.000,00	92,6
05.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	62.125.000,00	24.490.000,00	39,42
05.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	62.125.000,00	24.490.000,00	39,42
05.2.01.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	62.125.000,00	24.490.000,00	39,42
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>9.698.000,00</b>	<b>7.829.800,00</b>	<b>80,74</b>
06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.698.000,00	7.829.800,00	80,7
06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	9.698.000,00	7.829.800,00	80,74
06.2.01.01.5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>9.698.000,00</b>	<b>7.829.800,00</b>	<b>80,74</b>
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.698.000,00	7.829.800,00	80,74
06.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	5.503.000,00	5.387.000,00	97,89
06.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.503.000,00	5.387.000,00	97,89
06.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	537.000,00	463.000,00	86,22
06.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	616.000,00	598.000,00	97,08
06.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.350.000,00	4.326.000,00	99,45
06.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.300.000,00	0	0
06.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.300.000,00	0	0
06.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.300.000,00	0	0
06.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.895.000,00	2.442.800,00	84,38
06.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.895.000,00	2.442.800,00	84,38
06.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.895.000,00	2.442.800,00	84,38
	<b>PAD 2023</b>	<b>856.000.000,00</b>	<b>22.703.000,00</b>	<b>2,65</b>
	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.682.581.999,00</b>	<b>2.643.724.132,00</b>	<b>98,55</b>
	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.782.441.752,00</b>	<b>1.411.254.612,00</b>	<b>79,18</b>
	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>134.847.000,00</b>	<b>126.600.000,00</b>	<b>93,88</b>
	<b>BELANJA DAERAH OPD DPMPTSP TA.2023</b>	<b>4.599.870.751,00</b>	<b>4.181.576.744,00</b>	<b>90,91</b>

Dengan menggunakan format penetapan kinerja, pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dilakukan pengukuran kinerja yang dituangkan dalam

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 diperoleh hasil capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Bengkayang sebesar 90.91%. Dengan capaian kinerja sebesar 90.91%, tersebut DPMPTSP Kabupaten Bengkayang dapat dikategorikan sebagai instansi yang cukup berhasil dalam pencapaian kerjanya.

#### **Pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2024**

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Tahun Anggaran 2024 dengan anggaran belanja modal dan Belanja Operasional Sebesar Rp. 5.072.219.676,- terdiri dari 6 program, 13 kegiatan, dan 38 Sub Kegiatan diharapkan Pencapaian Kinerja keberhasilan mencapai 100 % atau minimal sama dengan Tahun 2023.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut:

1. Validitas data dan informasi belum maksimal;
2. Belum optimalnya kemampuan sumber Daya Manusia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang;
3. Belum optimalnya koordinasi internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang maupun dengan Dinas dan Instansi terkait;
4. Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan.
5. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang dalam pelaksanaan urusan Penanaman Modal serta Perizinan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

## 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list ke working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi pelayanan dan perizinan dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang yang membantu Bupati Bengkayang, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang, ada 36 Jenis perijinan yang dilimpahkan kepada DPMPTSP Kabupaten Bengkayang, dari jumlah perizinan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah dan Perda Nomor 17 Tahun 2021 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan yang boleh ditarik hanya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dengan realisasi sebagai berikut :

JENIS LAIN	Restribusi Tahun 2017 (Rp.)	Restribusi Tahun 2018 (Rp.)	Restribusi Tahun 2019 (Rp.)	Restribusi Tahun 2020 (Rp.)	Restribusi Tahun 2021 (Rp.)	Restribusi Tahun 2022 (Rp.)	Restribusi Tahun 2023 (Rp.)	PENINGKATAN/PENURUNAN %
IMB/PIHG	1.749.655.800	255.823.506	814.464.467	751.272.164	298.341.172,50	321.893.200	22.703.000	107,89
UJUG	124.881.874,35	8.837.600	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	1.874.537.674,35	264.661.106	814.464.467	751.272.164	298.341.172,50	321.893.200	22.703.000	107,89

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang, dan atas perubahan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang proses pelayanan perizinan dimulai dari penerimaan berkas sampai dengan penyerahan SK izin kepada pemohon harus sesuai dengan standar waktu seperti yang telah ditentukan sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	STANDAR WAKTU PENYELESAIAN (HARI KERJA)	RATA RATA PENYELESAIAN (HARI KERJA)	TINGKAT KESESUAIAN %
<b>Perizinan</b>				
1.	Izin Gangguan	0	0	0
2.	Izin Layak Hygine Sanitasi	5	5	100
3.	Izin Pengelolaan Limbah Cair	5	5	100
4.	Izin Pemanfaatan Limbah Cair Untuk Aplikasi Ke Tanah	5	5	100
5.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	5	5	100
6.	Izin Pengumpulan Limbah B3	5	5	100
7.	Izin Lingkungan	5	5	100
8.	Izin Daur Ulang / Pengolahan Sampah	7	7	100
9.	Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	5	5	100
10.	Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman	5	5	100
11.	Izin Mendirikan Bangunan	7	7	100
12.	Izin Usaha Jasa Konstruksi	5	5	100
13.	Izin Lalu Lintas Angkutan Jalan	5	5	100
14.	Izin Pelayanan	5	5	100

15.	Izin Pendirian Rumah / Klinik Bersalin	5	5	100
16.	Izin Balai Pengobatan	5	5	100
17.	Izin Pendirian Rumah Sakit	5	5	100
18.	Izin Pendirian Puskusmas	5	5	100
19.	Izin Apotik	5	5	100
20.	Izin Optik	5	5	100
21.	Izin Pengobatan Tradisonal	5	5	100
22.	Izin Praktek Fisioterapi	3	3	100
23.	Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik	5	5	100
24.	Izin Toko Obat	5	5	100
25.	Izin Tukang Gigi	5	5	100
26.	Izin Praktek Dokter	5	5	100
27.	Izin Praktek Dokter Gigi	5	5	100
28.	Izin Praktek Dokter Spesialis	5	5	100
29.	Izin Praktek Bidan	5	5	100
30.	Izin Kerja Bidan	5	5	100
31.	Izin Praktek Perawat	5	5	100
32.	Izin Kerja Perawat	5	5	100
33.	Izin Praktek Perawat Gigi	5	5	100
34.	Izin Praktek Apoteker	5	5	100
35.	Izin Praktek Tenaga Teknis Kesehatan	5	5	100
36.	Izin Kerja Apoteker	5	5	100
37.	Izin Praktek Asisten Apoteker	5	5	100
38.	Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	5	5	100
39.	Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Minuman Beralkohol	5	5	100
40.	Izin Usaha Toko Modern	5	5	100
41.	Izin Pengelolaan Pasar Tradisional	5	5	100
42.	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan	5	5	100

43.	Izin Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman	5	5	100
44.	Izin Usaha Penggilingan Padi (Huler)	5	5	100
45.	Izin Kios Sarana Produksi	5	5	100
46.	Izin Usaha Industri	7	7	100
47.	Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi	3	3	100
48.	Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan	3	3	100
49.	Izin Usaha Hotel dan Penginapan	3	3	100
50.	Izin Usaha Kepariwisataaan	3	3	100
51.	Izin Usaha Perjalanan Wisata	3	3	100
52.	Izin Prinsip Penanaman Modal	7	7	100
53.	Izin Usaha Penanaman Modal	3	3	100
54.	Izin Lokasi	14	14	100
55.	Izin Perpanjangan Lokasi	5	5	100
56.	Izin Usaha Perkebunan	7	7	100
57.	Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B)	7	7	100
58.	Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P)	7	7	100
59.	Izin Perubahan Luas Lahan	7	7	100
60.	Izin Perubahan Luas Lahan melalui Perluasan Pengurangan	7	7	100
61.	Izin Jenis Tanaman	5	5	100
62.	Izin Diversifikasi Usaha	5	5	100
63.	Izin Usaha Pertanian	5	5	100
64.	Izin Usaha Produktifitas Benih	5	5	100
65.	Izin Produksi Bibit Ternak	5	5	100
66.	Izin Usaha Pakan Ternak	5	5	100
67.	Izin Fasilitas Rumah Hewan	5	5	100
68.	Izin Rumah Sakit Hewan	7	7	100
69.	Izin Rumah Potong Hewan	7	7	100
70.	Izin Usaha Pengedar Obat Hewan	5	5	100
71.	Izin Praktek Dokter Hewan	5	5	100
72.	Izin Pengolahan Ikan	7	7	100
73.	Izin Pengumpul dan Pemasaran Hasil Perikanan	7	7	100
74.	Izin Pembudidayaan Ikan	7	7	100
75.	Izin Kapal Pengangkutan Ikan	7	7	100
76.	Izin Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas	7	7	100
77.	Izin Panas Bumi	7	7	100

78.	Izin Sektor Ketenagalistrikan (PU)	7	7	100
79.	Izin Minyak dan Gas Bumi	7	7	100
80.	Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	5	5	100
81.	Izin Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja	5	5	100
82.	Izin Penempatan / Penyaluran Tenaga Kerja Swasta	5	5	100
<b>Non Perizinan</b>				
1.	Informasi Lahan	5	5	100
2.	Rekomendasi Hak guna Usaha (HGU)	7	7	100
3.	Izin Survey	3	3	100
4.	Izin Perubahan Penggunaan Tanah	5	5	100
5.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	3	3	100
6.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	3	3	100
7.	Tanda Daftar Industri (TDI)	3	3	100
8.	Izin Reklame / Iklan	5	5	100
9.	Tanda Daftar Usaha Peternakan	3	3	100
10.	Tanda Daftar Budi Daya Perkebunan	3	3	100
11.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	3	3	100
12.	Surat Tanda Daftar Waralaba	3	3	100
13.	Rekomendasi Pencabutan PKAPT Perdagangan Kayu atau Pulau	5	5	100
14.	Rekomendasi Pembangunan SPBU	5	5	100
15.	Sertifikat Laik Bangunan Gedung	5	5	100
16.	Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung	3	3	100
17.	Izin Pendidikan Formal Non Formal	5	5	100
18.	Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja	3	3	100
19.	Tanda Daftar Penempatan / Penyalur Tenaga Kerja Swasta	3	3	100
20.	Izin Penelitian /Research	3	3	100
21.	Izin Praktek Kerja Lapangan (PKL)	3	3	100
22.	Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN)	3	3	100

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Bengkayang mengalami peningkatan. Namun peningkatan kualitas pelayanan perizinan tersebut belum diikuti oleh beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang dalam peningkatan kualitas produk perizinan dan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia ;
2. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;

3. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi perizinan dan penanaman modal.
4. Kondisi saat ini tahun 2023 masih dalam penyusunan regulasi yang selanjutnya (jika Mendirikan Bangunan berubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung) sehingga perlu menyesuaikan regulasi yang baru.

### BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Agar visi dan misi dapat dilaksanakan secara terorganisasi dan terencana maka perlu ada alur kerja yang jelas dan terprogram yang dilaksanakan, Misi pembangunan Kabupaten Bengkulu untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu adalah *Misi 2 (Kedua) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat, dan Misi 3 (Ketiga) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah.* Ini merupakan acuan DPMPTSP Kabupaten Bengkulu dalam merumuskan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan sesuai tugas dan fungsi dalam bidang pelayanan yang akan mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati dan Wakil Bupati.

untuk *Misi Kedua dan Misi Ketiga* tersebut. Program unggulan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan Misi Kedua dan Misi Ketiga yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu yang merupakan Perencanaan Strategik, diantaranya:

1. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL.
2. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL.
3. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL.
4. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL.
5. PROGRAM PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL.
6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA.

Untuk pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, maka perlu adanya penetapan tujuan. Penetapan tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai gambaran tentang apa yang harus dilakukan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang merupakan fungsi/bidang kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah "Menerapkan Pelayanan Publik, Sistem Informasi Terpadu dan Penjamin Mutu Yang Berkualitas dan Efisien " dengan sasaran meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat.

### **3.1. TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang merupakan fungsi/bidang kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tujuan adalah "Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan melalui pengembangan industri perdagangan, investasi serta kemitraan antar pelaku ekonomi dalam situasi yang kondusif".

Berdasarkan pernyataan tujuan diatas serta pernyataan visi dan misi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditetapkanlah tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Bengkayang untuk waktu 1 – 5 tahun yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya Pelayanan Publik yang Mudah, Murah, Cepat Dan Tepat Serta Transparan.
2. Terciptanya iklim investasi daerah yang kondusif dan dapat menarik minat investor;
3. Menciptakan kepercayaan masyarakat dan investor kepada pemerintah daerah.

Adapun Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan Kerja yang akan dicapai secara nyata

melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan. Dari tujuan diatas maka sasarannya adalah sebagai berikut:

1. Penyederhanaan mekanisme perijinan dengan sistem pelayanan yang prima. Indikator sasaran ini yaitu 100% kesesuaian waktu rata-rata pemrosesan penerbitan izin dengan ketentuan (dengan catatan berkas perijinan yang masuk telah lengkap persyaratannya).
2. Meningkatkan sosialisasi tentang investasi di Kabupaten Bengkayang. Adapun indikator tercapai sasaran tersebut yaitu adanya peningkatan Nilai Investasi PMA DAN PMDN.
3. terselesaikannya kasus dan sengketa antar investor dan antara investor dengan masyarakat. Adapun indikatornya jumlah kasus dan sengketa yang terselesaikan.

Berdasarkan kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah ditetapkan dalam strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026. Visi RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan Kepala Daerah. Visi Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 – 2026 yaitu; ” **KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIR, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING DITOPANG PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN TERBUKA** “. Dengan tujuan bahwa Masyarakat yang dilayani harus merasakan pelayanan yang optimal dalam wujud pelayanan prima dengan prinsip mengutamakan pelanggan, system yang efektif, melayani dengan hati nurani, perbaikan berkelanjutan dan memberdayakan pelanggan. Pelayanan prima juga harus mencerminkan karakteristik pelayanan umum yang sederhana, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan dan ketepatan waktu.

Untuk mengimplementasikan pelayanan prima tersebut, harus ada kesungguhan (komitmen), penguasaan dan konsistensi yang sangat tinggi, oleh karena itu pemberdayaan aparatur sangat penting guna meningkatkan kompetensi pelayanan sektoral agar tidak mengecewakan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan suatu strategi dan kebijakan yang berpihak kepada pelayanan publik yang akuntabel dan transparan.

Strategi yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang.

Adapun kebijakan dapat diartikan sebagai ketentuan–ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, serta visi dan misi instansi Pemerintah, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang.

Kebijakan satuan kerja sedapat mungkin selaras dengan kebijakan Pemerintah bahkan dengan kebijakan pemerintah pusat, Kebijakan (umum) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Bengkayang yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan prosedur perijinan yang memudahkan pelayanan publik.
2. Mengembangkan prosedur perizinan penanaman modal dan pembinaan investasi yang memudahkan investor/perusahaan.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasarannya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsinya, maka program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 akan dilaksanakan beberapa program dan kegiatan.

### **3.2. Program dan Kegiatan**

Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang.

#### **Program Utama**

1. **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**, dengan kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. **Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**

1. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenni Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
  2. Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
  - b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
    1. Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)
    2. Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
  2. **Program Promosi Penanaman Modal**, dengan kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
      1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
      2. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
  3. **Program Pelayanan Penanaman Modal**, dengan kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
      1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
      2. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
      3. Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
      4. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.
  4. **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**, dengan kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
      1. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya.
      2. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
      3. Pengawasan Penanaman Modal
  5. **Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman modal**, dengan kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :
-

- a. Pengelola Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik

**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

**1. *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Evaluasi Kinerja serta akuntabilitas keuangan dan pencapaian kinerja organisasi.

**2. *Administrasi Keuangan***

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk mengakomodir Gaji dan tunjangan ASN dan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

**3. *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan menyiapkan sumber daya aparatur yang handal dan pencapaian kinerja organisasi

**4. *Administrasi Umum Perangkat Daerah***

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan menyiapkan Kebutuhan sarana dan prasarana Kantor.

**5. *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk Pengadaan Barang serta meningkatkan kebutuhan peralatan sarana dan prasarana Kantor.

**6. *Penyediaan Jasa Penunjangn Urusan Pemerintah Daerah***

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk mengakomodir Jasa Operasional Kantor diantaranya air, listrik dan internet

**7. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk Jasa Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor, peralatan jasa Kendaraan Dinas Operasional serta jasa pemeliharaan peralatan lainnya.

Uraian Kegiatan dari masing – masing program dapat dilihat pada tabel berikut (terlampir):

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN**  
**PENBANAAN PERANGKAT DAERAH**

Sumber dana yang dibutuhkan untuk membiayai program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 bersumber dari DAU.

DAU merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD nya.

Sumber dana yang dibutuhkan untuk membiayai program dan kegiatan tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut (terlampir)

## BAB V PENUTUP

### 4.1. Catatan Penting

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

**Output Rencana Kerja** Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang adalah Program Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang

### 4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 – 2026. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 agar lebih terfokus sesuai dengan program prioritas.

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja (RENJA) Bengkayang Tahun 2025, kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang dengan Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional Ahli Madya dan Pejabat Fungsional Ahli muda serta Pejabat Pengawas beserta staf yang ada di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang;

- (2) Seluruh Pejabat dan staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang agar melaksanakan program-program Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya;
- (3) Setiap Pejabat dan staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang agar mengacu pada Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2025.
- (4) Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 merupakan dasar penyusunan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2025;
- (5) Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Anggaran PD (RKA-PD);
- (6) Dalam pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 – 2026, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Kabupaten Bengkayang, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil;

#### **4.3. Rencana Tindak Lanjut**

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, Rencana Kerja (RENJA) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang. Rencana Kerja (RENJA) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Demikianlah Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 ini disusun dalam kaitannya dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus Akuntabilitas Kinerja yang dimulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan diakhiri dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Rencana Kerja (RENJA) merupakan perencanaan tahunan dari Rencana Strategis yang berjangka waktu lima tahun. Rencana kerja (RENJA) memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran serta program, kegiatan dan sug kegiatan yang ditetapkan sebagai suatu strategi untuk mencapai sasaran tersebut sehingga dalam dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Bengkayang, Juni 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KAB. BENGKAYANG



PAULUS SH., M.Kn

Pembina Tk. I

NIP. 19740718 200212 1 004

MATRIK RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

Unit Organisasi : 2.18. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE BENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2023	PROSES/ CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KEBAHUKAAN PERANGKAT DAERAH			PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT MAJU RENCANA TAHUN 2025		PIRAHOKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL		DAERAH	TARGET	
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU															
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN					5.827.695.081,00						8.098.687.772,00		
2.18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN					5.827.695.081,00						8.098.687.772,00		
1.	2.18.01	PROGRAM PERLUANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tempuhnya Layanan Administrasi Pemerintahan	100 %	81,46%	95%	4.637.195.081,00	100 %					6.208.966.822,00	100 %	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tempuhnya Dokumen Perencanaan dan Produksi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	59,80%	95%	68.274.000,00	100 %					71.643.094,00	100 %	DPMPPTSP
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	69,44%	75%	35.000.000,00	2 Dokumen					38.368.094,00	2 Dokumen	DPMPPTSP
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	92,77%	95%	6.655.000,00	2 Dokumen					6.655.000,00	2 Dokumen	DPMPPTSP
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0%	100%	6.655.000,00	1 Dokumen					6.655.000,00	1 Dokumen	DPMPPTSP
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	38,85%	100%	6.655.000,00	1 Dokumen					6.655.000,00	1 Dokumen	DPMPPTSP
	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	46,69%	100%	6.655.000,00	1 Dokumen					6.655.000,00	1 Dokumen	DPMPPTSP
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD													

NO	KODE	URUTAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / REGIATAN / SUB REGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / REGIATAN / SUB REGIATAN	TARGET AKHIR PROGRAM / REGIATAN / SUB REGIATAN	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PENCAPAIAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN BINAHA DAN BINAUSA PENGUSAHA				PRIORITY		REVISI/REVISI BINAUSA	PERSARAN MASUK BINAUSA TAHUN 2024	PERANGKAT DAERAH PELAKSANAAN BINAUSA
							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH			
			Ambil Laporan Capaian Energi dan Binausa Realisasi Energi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Energi dan Binausa Realisasi Energi SKPD	1 Laporan	46,60%	100%	6.655.000,00	Kab. Bengkulu Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DAERAH ALOKASI UMUM			1 Laporan	6.655.000,00	DPNPTSP Kab. Bengkulu	DPNPTSP
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertumbuhnya Administrasi Keuangan OPD	100 %	94,20%	100%	3.396.399.348,00					100 %	4.887.348.348,00	DPNPTSP Kab. Bengkulu	DPNPTSP
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ambil Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	99,12%	100%	3.277.522.088,00	Kab. Bengkulu Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DAERAH ALOKASI			34 Orang/bulan	4.033.028.028,00	DPNPTSP Kab. Bengkulu	DPNPTSP
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Ambil Dokumen Hasil Penyelidikan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Dokumen	94,16%	100%	253.927.280,00	Kab. Bengkulu Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DAERAH ALOKASI			10 Dokumen	457.269.028,00	DPNPTSP Kab. Bengkulu	DPNPTSP
	2.18.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Ambil Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	1 Laporan	86,14%	100%	11.500.000,00	Kab. Bengkulu Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DAERAH ALOKASI			1 Dokumen	13.800.000,00	DPNPTSP Kab. Bengkulu	DPNPTSP
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Ambil Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	60,42%	100%	11.500.000,00	Kab. Bengkulu Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DAERAH ALOKASI			1 Laporan	13.800.000,00	DPNPTSP Kab. Bengkulu	DPNPTSP
	2.18.01.2.02.0006	Pengadaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemertiksaan	Ambil Dokumen Bahan Tanggapan Pemertiksaan dan Tidak Lajut Pemertiksaan	1 Dokumen	0%	100%	6.650.000,00	Kab. Bengkulu Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DAERAH ALOKASI			1 Dokumen	7.980.000,00	DPNPTSP Kab. Bengkulu	DPNPTSP
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Ambil Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 Laporan	38,37%	100%	35.500.000,00	Kab. Bengkulu Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DAERAH ALOKASI UMUM			2 Laporan	91.164.034,40	DPNPTSP Kab. Bengkulu	DPNPTSP
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertumbuhnya Seluruh Pelayanan Administrasi Umum di Lingkungan	100 %	6,14%	75%	30.000.000,00					100 %	33.214.725,00	DPNPTSP Kab. Bengkulu	DPNPTSP
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Ambil Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	6,14%	75%	30.000.000,00	Kab. Bengkulu Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DAERAH ALOKASI			7 Orang	34.214.025,00	DPNPTSP Kab. Bengkulu	DPNPTSP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REHSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN CAPAIAN BENUA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN TARGET BENUA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KEMERIAH DAN KERANGKAA PENDAHARAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PILIHAN MAJU BENCANA TAHUN 2025		PILANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PASU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PASU INDIKATIF (Rp)	
2.18.01.2.06	2.06	Administrasi Umum Peringkat Daerah	Terpekaanya Seluruh Pelayanan Administrasi Umum di Lingkungan Kantor	100 %	83,92%	100%	334.500.000,00			100 %		DPMPTSP Kab Bangkayang	100 %	610.881.254,00	DPMPTSP	
2.18.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		10 Paket	97,95%	100%	17.000.000,00	Kab. Bangkayang Semua Kecamatan Semua Ud.Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKAS	10 Paket		DPMPTSP Kab Bangkayang	10 Paket	75.000.000,00	DPMPTSP	
2.18.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Paket Perbaikan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	44 Paket	97,33%	100%	50.500.000,00	Kab. Bangkayang Semua Kecamatan Semua Ud.Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKAS	44 Paket		DPMPTSP Kab Bangkayang	44 Paket	87.000.000,00	DPMPTSP	
2.18.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	205 Paket	94,67%	100%	60.000.000,00	Kab. Bangkayang Semua Kecamatan Semua Ud.Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKAS	205 Paket		DPMPTSP Kab Bangkayang	205 Paket	94.000.000,00	DPMPTSP	
2.18.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	65000 Paket	86,69%	95%	45.000.000,00	Kab. Bangkayang Semua Kecamatan Semua Ud.Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKAS	65000 Paket		DPMPTSP Kab Bangkayang	65000 Paket	80.000.000,00	DPMPTSP	
2.18.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 Dokumen	44,51%	70%	12.000.000,00	Kab. Bangkayang Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKAS	5 Dokumen		DPMPTSP Kab Bangkayang	5 Dokumen	75.000.000,00	DPMPTSP	
2.18.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SOPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SOPD	24 Laporan	80,36%	90%	150.000.000,00	Kab. Bangkayang Semua Kecamatan Semua Ud.Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKAS	24 Laporan		DPMPTSP Kab Bangkayang	24 Laporan	200.000.000,00	DPMPTSP	
2.18.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Peringkat Daerah	Terpekaanya Sarana Prasarana untuk Pelayanan Administrasi Umum diLingkungan Kantor	100 %	93,94%	100%	252.000.000,00			100 %		DPMPTSP Kab Bangkayang	100 %	157.770.480,00	DPMPTSP	
2.18.01.2.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	93,96%	100%	120.000.000,00	Kab. Bangkayang Semua Kecamatan Semua Ud.Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKAS	10 Unit		DPMPTSP Kab Bangkayang	10 Unit	10.710.480,00	DPMPTSP	
2.18.01.2.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Renovasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Renovasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Bulan Unit	87,50%	100%	132.000.000,00	Kab. Bangkayang Semua Kecamatan Semua Ud.Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKAS	12 Bulan Unit		DPMPTSP Kab Bangkayang	12 Bulan Unit	87.000.000,00	DPMPTSP	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INISIATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REINSTRUMENTASI OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2023	PENCAPAIAN CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2023			PENCAPAIAN CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2024			PENCAPAIAN CAPAIAN RENCANA TAHUN 2025			PENGANGKUTAN SUDUT PANGKALAN PEMANGKUDUNG JARUM
						TARGET	FAKSI INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	KELOMPOK SASARAN	RENCANA TARGET	FAKSI INDIKATIF (Rp)	RENCANA TARGET	
2.18.01.2.08.0001	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemangku Urusan Pemertahanan Daerah	Tersenyawanya Seluruh Pelayanan Administrasi Umum di Lingkungan Kantor	100%	72,72%	100%	100%	100%	190.000.000,00			100%	171.453.887,26		
2.18.01.2.08.0002	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemertahanan	Ambil Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	350 Laporan	100%	100%	100%	10.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua KadDes	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKAS		350 Laporan	174.453.887,26		
2.18.01.2.08.0003	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemertahanan, Biaya Pemertahanan, Sumbat Daya Air dan Listrik	Ambil Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumbat Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	55,42%	100%	100%	80.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua KadDes	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKAS		12 Laporan	161.202.262,02		
2.18.01.2.08.0004	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ambil Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	22 Laporan	79,47%	80,00%	80,00%	100.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua KadDes	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKAS		22 Laporan	200.202.262,02		
2.18.01.2.09	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Baring MGBK Daerah Pemertahanan	Tersenyawanya Pemeliharaan Baring MGBK Daerah di Lingkungan Kantor	100%	81,30%	85,00%	100%	145.820.713,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua KadDes			100%	135.823.298,36		
2.18.01.2.09.0001	2.18.01.2.09	Penyediaan Jasa Pemertahanan, Biaya Pemertahanan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Pemeliharaan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pejabye	12 Unit	83,31%	85,10%	85,10%	10.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua KadDes	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKAS		12 Unit	13.423.202,32		
2.18.01.2.09.0002	2.18.01.2.09	Penyediaan Jasa Pemertahanan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pejabye	12 Unit	84,91%	85,00%	85,00%	85.820.713,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua KadDes	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKAS		12 Unit	174.996.752,42		
2.18.01.2.09.0006	2.18.01.2.09	Pemertahanan Perakitan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perakitan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	96,17%	100%	100%	25.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua KadDes	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKAS		10 Unit	81.123.342,58		
2.18.01.2.09.0010	2.18.01.2.09	Pemertahanan/Rahubalisasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	3 Unit	52,40%	75,00%	75,00%	25.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua KadDes	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKAS		3 Unit	81.123.342,58		
2.18.02	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN BELIM PENANAMAN MODAL		4 Babas	73,92%	80,19%	80,19%	425.000.000,00				4 Babas	637.798.950,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE BERTAKWA CPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAGRAM MAJU BENCANA TAHUN 2024		PEMBANGKIT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
	2.18.02.2.01	Penerapan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlahnya Dokumen Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dan Dokumen Keperawatan Kemudahan antara Usaha Besar (PMA/PMMDN) dengan UMKDN di Daerah	3 Dokumen	73,92%	80,00%	3 Dokumen	250.000.000,00				DPMPTSP Kab Bantul	3	375.290.950,00	DPMPTSP	
	2.18.02.2.01.0001	Penerapan Kebijakan Daerah Mengingat Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 Dokumen	69,98%	75,00%	2 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Bantul Semua Kecamatan Semua Kal/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI		DPMPTSP Kab Bantul	2	300.000.000,00	DPMPTSP	
	2.18.02.2.01.0003	Facilitasi Kemudahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Keperawatan Kemudahan antara Usaha Besar (PMA/PMMDN) dengan UMKDN di daerah	5 Dokumen	66,96%	70,00%	5 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Bantul Semua Kecamatan Semua Kal/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI		DPMPTSP Kab Bantul	5	75.290.950,00	DPMPTSP	
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Dokumen RUPM	3 Dokumen	73,92%	75,00%	3 Dokumen	175.000.000,00				DPMPTSP Kab Bantul	3	242.500.000,00	DPMPTSP	
	2.18.02.2.02.0003	Permutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	2 Daerah	77,87%	80,00%	2 Daerah	50.000.000,00	Kab. Bantul Semua Kecamatan Semua Kal/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI		DPMPTSP Kab Bantul	2	75.000.000,00	DPMPTSP	
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	70%	75,00%	1 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Bantul Semua Kecamatan Semua Kal/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI		DPMPTSP Kab Bantul	1	187.500.000,00	DPMPTSP	
3.	2.18.04	PROGRAM PELATIHAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00 %	93,40%	100%	85,00 %	450.000.000,00					85,00 %	678.650.000,00		
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu bidang Penanaman Modal yang Mengalib	Meningkatnya pengalib pelayanan perizinan dan non perizinan PM berbasis sistem pelayanan perizinan berbasis	85,00 %	93,40%	100%	85,00 %	450.000.000,00						678.650.000,00	DPMPTSP	
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	91,17%	95,00%	2 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Bantul Semua Kecamatan Semua Kal/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI		DPMPTSP Kab Bantul	2	38.750.000,00	DPMPTSP	
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET ADIKSI PERIODE RENCANA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN BERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		PRAKTIK MAJU BENCANA TAHUN 2023		REKORD/DAFTAR PENCAPAIAN TAHUN JAWAB
							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				700 Pelaku Usaha	91,42%	95,00%	700 Pelaku Usaha	315.000.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			750 Pelaku Usaha	472.500.000,00	DPMPPTSP
	2.18.04.2.01.0002		Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi pelatihan berusaha berbasis risiko	400 Orang	97,42%	100%	400 Orang	60.000.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			400 Orang	30.000.000,00	DPMPPTSP
	2.18.04.2.01.0008		Penantuan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan berusaha berbasis risiko	2 Kegiatan Usaha	96,24%	100%	2 Kegiatan Usaha	50.000.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			2 Kegiatan Usaha	75.000.000,00	DPMPPTSP
4.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase kegiatan promosi tingkat regional	80 %	78,83%	80,00%	80 %	110.000.000,00					80 %	185.000.000,00	
	2.18.03.2.01	Penyenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Zonaran, Program & Kegiatan BKPD yang konsisten dengan RPJMD & Rencana PD Kabupaten/Kota	80 %	76,90%	80,00%	80 %	110.000.000,00						185.000.000,00	DPMPPTSP
	2.18.03.2.01.0002		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	87,80%	75,00%	1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI			1 Dokumen	90.000.000,00	DPMPPTSP
	2.18.03.2.01.0003		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	84,50%	85,10%	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI			1 Dokumen	75.000.000,00	DPMPPTSP
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase persetujuan yg melulaskan LKPM	85,33%	74,47%	85,50%	85,53%	155.500.000,00					85,53%	233.250.000,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelaku usaha yang menyempatkan LKPM secara tepat waktu dan akurat	85,53 %	74,50%	85,50%	85,53 %	155.500.000,00						233.250.000,00	DPMPPTSP
	2.18.05.2.01.0004		Penyelesaian Pemalsahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam memfasilitasi Kegiatan Usahanya												







No	BIBLI	Kategori	Judul	Penyusun	Tahun	Jumlah	Tipe	Kategori				Subkategori				Jumlah	Tipe	Keterangan
								Fiksi	Non Fiksi	Ilustrasi	Animasi	Kategori	Subkategori	Jumlah	Tipe			
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL PERIODE RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI TAHUN 2022	PENCAPAIAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KEARIFAN PEDAGOGIS						KELOMPOK MUSYAWARAH	PENCAPAIAN SAJAJI RENCANA TAHUN 2024		PERMUTUHAN MUSYAWARAH TAHUN 2024
							TARGET 2023	FAKUS INDIKATOR (RUB)	LOKASI	BIBER DANA	PROFITAS			TARGET	PADA RESTRUKTURISASI TAHUN 2024	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SPM yang Diperoleh	300 Laporan	10.000.000,00	Kab. Bengkayang, Sembawa, Kacamatan, Semua KadDes	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LULUS	-	-	DPMPTSP	14	15	16	18	DHAK PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18.01.2.06.0002	Penyediaan Jasa Komunitas, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunitas, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diperoleh	12 Laporan	80.000.000,00	Kab. Bengkayang, Sembawa, Kacamatan, Semua KadDes	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LULUS	-	-	DPMPTSP	15	16	17	19	DHAK PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18.01.2.06.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diperoleh	27 Laporan	100.000.000,00	Kab. Bengkayang, Sembawa, Kacamatan, Semua KadDes	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LULUS	-	-	DPMPTSP	16	17	18	20	DHAK PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18.01.2.06	Pemeliharaan Bering Maki Daerah Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	Tersenyawanya Pemeliharaan Bering Maki Daerah di Langgungan Kantor	100 %	145.805.713,00	-	-	-	-	DPMPTSP	18	19	20	21	DHAK PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18.01.2.06.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baya Pemeliharaan, dan Pajal Kandaraan Perorangan Dinas atau Kandaraan Dinas Jember	Jumlah Kandaraan Perorangan Dinas atau Kandaraan Dinas Jabatan yang Diperoleh per Berkas/Papernya	12 Lks	10.000.000,00	Kab. Bengkayang, Sembawa, Kacamatan, Semua KadDes	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LULUS	-	-	DPMPTSP	19	20	21	22	DHAK PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18.01.2.06.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baya Pemeliharaan, Pajal dan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kondisi Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperoleh dan diketahui Pajal dan Perorangan	12 Lks	65.820.713,00	Kab. Bengkayang, Sembawa, Kacamatan, Semua KadDes	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LULUS	-	-	DPMPTSP	20	21	22	23	DHAK PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18.01.2.06.0006	Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya yang Diperoleh	10 Lks	25.000.000,00	Kab. Bengkayang, Sembawa, Kacamatan, Semua KadDes	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LULUS	-	-	DPMPTSP	21	22	23	24	DHAK PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18.01.2.06.0010	Pemeliharaan/Kebersihan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperoleh/Kebersihan	3 Lks	25.000.000,00	Kab. Bengkayang, Sembawa, Kacamatan, Semua KadDes	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LULUS	-	-	DPMPTSP	22	23	24	25	DHAK PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KUM PENANAMAN MODAL	Tersenyawanya Jumlah kegiatan program PM yang dipromosikan	3 bulan	428.000.000,00	-	-	-	-	DPMPTSP	23	24	25	26	DHAK PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

NO	KEMER	URAIAN TUGAS/URAIAN KEGIATAN/URAIAN LOKASI/TAHUN/URAIAN KEMER/URAIAN	REVISI/REVISI/REVISI/REVISI/REVISI	TANGGAL AWAL/TAHUN/TAHUN/TAHUN/TAHUN	REVISI/REVISI/REVISI/REVISI/REVISI	REVISI/REVISI/REVISI/REVISI/REVISI	REVISI/REVISI/REVISI/REVISI/REVISI	CAPAIAN/REVISI/REVISI/REVISI/REVISI				REVISI/REVISI/REVISI/REVISI/REVISI	REVISI/REVISI/REVISI/REVISI/REVISI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
								REVISI/REVISI/REVISI/REVISI/REVISI	REVISI/REVISI/REVISI/REVISI/REVISI	REVISI/REVISI/REVISI/REVISI/REVISI	REVISI/REVISI/REVISI/REVISI/REVISI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	2	Penelitian Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Kecamatan...		4	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

No	Kategori	Materi / Submateri / Kompetensi (Materi / Submateri / Kompetensi)	Indikator / Subindikator / Kompetensi Dasar / Kompetensi Dasar	Tujuan Pembelajaran / Indikator / Kompetensi Dasar / Kompetensi Dasar	Materi Pokok / Submateri / Kompetensi Dasar / Kompetensi Dasar	Materi Pokok / Submateri / Kompetensi Dasar / Kompetensi Dasar	Kemampuan Berpikir Kritis / Kemampuan Berpikir Kritis					Kemampuan Berpikir Kritis / Kemampuan Berpikir Kritis	Kemampuan Berpikir Kritis / Kemampuan Berpikir Kritis	Kemampuan Berpikir Kritis / Kemampuan Berpikir Kritis	Kemampuan Berpikir Kritis / Kemampuan Berpikir Kritis	Kemampuan Berpikir Kritis / Kemampuan Berpikir Kritis	Kemampuan Berpikir Kritis / Kemampuan Berpikir Kritis				
							Kemampuan Berpikir Kritis / Kemampuan Berpikir Kritis	Kemampuan Berpikir Kritis / Kemampuan Berpikir Kritis	Kemampuan Berpikir Kritis / Kemampuan Berpikir Kritis	Kemampuan Berpikir Kritis / Kemampuan Berpikir Kritis	Kemampuan Berpikir Kritis / Kemampuan Berpikir Kritis							Kemampuan Berpikir Kritis / Kemampuan Berpikir Kritis	Kemampuan Berpikir Kritis / Kemampuan Berpikir Kritis	Kemampuan Berpikir Kritis / Kemampuan Berpikir Kritis	Kemampuan Berpikir Kritis / Kemampuan Berpikir Kritis
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7			
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8			
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9			
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			

